

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti akan menyajikan secara keseluruhan hasil temuan yang peneliti temukan dilapangan baik dari hasil wawancara mendalam dengan informan dan narasumber berikut observasi partisipan yang berkenaan dengan pelaksanaan aktivitas *public relations* dalam mengkomunikasikan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kecamatan Karangpawitan tahun 2020.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan informan utama dari pihak Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA) Kabupaten dan informan tambahan dari publik sasaran. Informan tambahan tersebut terdiri dari petugas lini lapangan dan akseptor KB. Sebelum melakukan wawancara dengan informan, peneliti meminta izin terlebih dahulu untuk melakukan wawancara. Setelah itu melakukan penjadwBubu wawancara dengan menyesuaikan waktu kesedian informan.

Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi partisipatif terkait aktivitas *public relations* yang dilakukan dalam upaya mengkomunikasikan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2020. Observasi partisipatif dilakukan di Balai Penyuluh KB Kecamatan Karangpawitan, Posyandu RW 2 dan RW 4 Desa Tanjungsari, Posyandu RW 4 dan RW 5 Desa Godog, Balai Sawala Kampung KB Kp Irigasi Desa Tanjungsari dan kantor dinas DPPKBPPPA Garut. Observasi partisipatif ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh terkait pelaksanaan aktivitas *public relations* yang dilakukan oleh para PKB/ PLKB atau

yang lebih dikenal dengan nama petugas lini lapangan KB kepada kelompok sasarannya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model proses manajemen PR Cutlip, Center dan Broom sebagai arahan penelitian dalam menguraikan pelaksanaan aktivitas *public relations* dalam mengkomunikasikan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kecamatan Karangpawitan tahun 2020.

Untuk mendapatkan informasi sedalam-dalamnya, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan 4 informan yang terdiri dari 1 informan utama dari pihak Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA) Kabupaten Garut, 1 dari unsur PKB (Petugas Keluarga Berencana), dan 1 mewakili Akseptor KB. Selain wawancara dengan informan, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan kajian penelitian ini yaitu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut.

#### **4.1 Profil Informan**

- **Informan Utama**

##### **Informan 1**

Nama : Bubu Burhanudin Apip

Usia : 54 tahun

Jabatan : Sekretaris Dinas

Bubu Burhanudin Apip merupakan pegawai yang sudah bekerja sangat lama di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut, secara masa kerja dikatakan cukup senior. Bubu sudah bekerja mulai dari tahun 1990 sampai sekarang, sudah hampir lebih dari 32 tahun Bubu mengabdikan di dinas baik dari mulai awal BKKBN sampai sekarang menjadi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut. Pengalaman bekerja Bubu di dinas ini beralih-alih, awalnya menjadi petugas lini lapangan KB (PLKB/PKB), lalu menjadi Kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis) KB Kecamatan Leles, setelah itu beralih menjadi Kasubbag Advokasi tahun 2012 beralih menjadi Kasubag keuangan dan dari tahun 2013-2020 menjadi Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan mulai tahun 2020 hingga sekarang beliau menjadi Sekretaris Dinas atau bisa dikatakan sebagai wakil kepala Dinas.

### **Informan 2**

Nama : Tuti Kartinah

Usia : 50 Tahun

Jabatan : PKB Ahli Madya (Petugas Lini Lapangan)

Tuti Kartinah sudah bekerja di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut selama 22 tahun sejak dari tahun 1999. Tuti merupakan petugas lapangan yang bisa dikatakan senior karena sejak pertama kali ditugaskan Tuti bertugas sebagai petugas lapangan program Keluarga Berencana. Kini Tuti menjabat sebagai koordinator Petugas Keluarga Berencana di Kecamatan Karangpawitan.

### **Informan 3**

Nama : Yanti Nuryanti

Usia : 37 Tahun

Status : Akseptor KB

Yanti merupakan salah satu akseptor yang ada di Desa Godog Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. Ia merupakan ibu rumah tangga yang sudah lebih dari 5 tahun telah menjadi akseptor lestari program KB. Yanti telah memiliki 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Saat ini Yanti merupakan akseptor yang menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang, yaitu IUD (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim). Berdasarkan informasi awal, alat kontrasepsi jangka panjang seperti IUD itu cukup disegani oleh calon akseptor karena bertebarannya informasi tentang IUD ini. Tetapi, Yanti berketetapan hati dan konsisten untuk menggunakan alat kontrasepsi ini.

### **Narasumber**

Nama : Yayan Waryana

Usia : 54 Tahun

Jabatan : Kepala Dinas PPKBPPPA

Yayan Waryana merupakan kepala dinas yang telah menjabat sejak akhir tahun 2020 hingga saat ini. Sebelum menjadi Kepala Dinas PPKBPPPA, Yayan merupakan Sekretaris Dinas PPKBPPPA, sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Keluarga Berencana lebih dari 5 tahun. Yayan merupakan pejabat eselon II yang memiliki latar belakang sebagai petugas lini lapangan. Sejak diangkat pertama sebagai PNS, Yayan berstatus sebagai petugas Keluarga

Berencana Kecamatan Karangpawitan. Bila dilihat dari riwayat karirnya, beliau merupakan pejabat dinas yang dibesarkan oleh BKKBN, kini ia berada pada karir tertingginya sebagai kepala dinas.

**Tabel 4.1**  
**Data Profil Informan dan Narasumber**

| No | Nama            | Jenis   | Jabatan                  | Status     |
|----|-----------------|---------|--------------------------|------------|
|    |                 | Kelamin |                          |            |
| 1  | Bubu Burhanudin | L       | Sekretasi Dinas PPKBPPPA | Informan   |
| 2  | Tuti Kartinah   | P       | PKB Ahli Madya BKKBN     | Informan   |
| No | Nama            | JK      | Jabatan                  | Status     |
| 3  | Yanti Nursanti  | P       | Akseptor KB              | Informan   |
| 4  | Yayan Waryana   | L       | Kepala Dinas PPKBPPPA    | Narasumber |

Sumber : Hasil Olah data peneliti Tahun 2020

## **4.2 Deskripsi Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Mendefinisikan masalah**

Pada tahap pertama ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana para PKB/ PLKB (Petugas Lini Lapangan) mendefinisikan masalah yang tengah terjadi di wilayah kerjanya sebelum menetapkan perencanaan aktivitas *public relations* untuk mengkomunikasikan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Adapun dinas mengawali tahap mendefinsikan masalah terkait aktivitas *public relations* dalam mengkomunikasikan program Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk ini dengan menyampaikan bagaimana bentuk aktivitas *public relations* yang dilakukan oleh para PKB/ PLKB. Bubu sebagai informan pertama memberikan keterangan:

*“Pada dasarnya public relations itu menyampaikan informasi kepada masyarakat. Istilah di kami itu KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi). Tujuan dari KIE itu untuk memberikan informasi atau penyuluhan kepada*

*masyarakat. Yang tadinya belum tahu menjadi tahu, yang sudah tahu menjadi paham dan akhirnya menjadi pelanggan program KB dan Pengendalian Penduduk itu, istilahnya akseptor. Jadi secara umum, memang tugas utama para petugas lapangan itu menyampaikan informasi program kepada masyarakat. Karena pandemi ini, aktivitas public relations menjadi terkendala”.*

Bubu mengungkapkan bahwa aktivitas *public relations* adalah tugas yang melekat pada segenap pegawai Dinas PPKBPPPA atau BKKBN pada umumnya. Namun, istilah yang lebih populer dipakai di lingkungan BKKBN adalah KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi). Tahun 2020 merupakan tahun yang memberikan tantangan bagi segenap warga dunia. Merebaknya COVID-19 pada akhir tahun 2019 telah mengubah seluruh tatanan kehidupan, termasuk kelangsungan program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pandemi ini secara langsung telah berpengaruh pada pelaksanaan aktivitas *public relations* yang dilakukan oleh para PKB/ PLKB pada tingkat lini lapangan. Jadi, secara singkat aktivitas *public relations* ini masih berlangsung namun terdapat kendala yang dialami oleh para PKB/PLKB bahkan dinas sendiri mengalami hambatan dalam melakukan aktivitas *public relations* dikarenakan merebaknya virus korona ini. Hal senada diungkapkan oleh Tuti sebagai informan kedua:

*“Tugas kami itu menyampaikan informasi program kepada kader, memfasilitasi calon akseptor menjadi akseptor, sesekali mengadakan penyuluhan atau sosialisasi dalam bentuk KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi). Intinya kami itu mengajak kepada masyarakat luas khususnya para keluarga yang masih PUS untuk menjadi akseptor. Kami juga berkoordinasi dengan sector terkait seperti puskesmas, bidan karena untuk pemasangan alat kontrasepsinya harus oleh petugas kesehatan. Karena COVID-19 aktivitas kami untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut menjadi sedikit terganggu, kini komunikasi kami lebih sering melalui WA jarang bertemu langsung.”.*

Tuti memaparkan bahwa tugas PKB/PLKB itu lebih ke kegiatan penggerakan partisipasi masyarakat supaya ikut serta dalam Program KB. Aktivitas *Public Relations* yang sering dilakukan adalah dalam bentuk koordinasi dengan kader dan pihak terkait terutama petugas kesehatan. Selain itu, Tuti juga memiliki agenda untuk melakukan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat. Namun, akibat merebaknya virus korona sejak tahun 2019 akhir, aktivitas *public relations* menjadi terbatas karena terikat aturan-aturan.

Jadi, dari segi konsep aktivitas *public relations* terdapat kesamaan antara yang disampaikan oleh Bubu dan Tuti. Begitu pula dengan hambatan atau masalah yang dialami, yaitu kendala akibat mewabahnya virus Korona yang menyebabkan harus adanya penyesuaian dalam melakukan aktivitas *public relations*. Biasanya dilakukan secara tatap muka langsung, kini menjadi tatap muka terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan atau penyampaian informasi atau sosialisasi ke cara virtual. Apa yang diungkapkan oleh Bubu dan Tuti ini kemudian dikuatkan oleh Yanti sebagai akseptor, yang menyampaikan bahwa: “Biasanya para PKB/ PLKB suka mengunjungi Posyandu-Posyandu. Setiap sebulan sekali juga kita suka ada pertemuan Pos KB sub Pos KB dengan PLKB.”. Dalam hal ini Yanti menambahkan keterangan cara atau metode yang dilakukan PKB/ PLKB untuk melaksanakan aktivitas *public relations* di masyarakat. Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) adalah tempat yang sering dipilih para PKB/PLKB untuk menyampaikan informasi atau KIE kepada para PUS khususnya kaum ibu yang kebetulan berkumpul di sana untuk membawa balitanya.

Eksplorasi informasi di atas merupakan awal dari penelitian ini. Dengan memahami konsep yang sama antara 3 informan di atas akan memberikan kemudahan untuk mengakses informasi lebih jauh terhadap aktivitas *public relations* yang dilakukan para PKB/ PLKB dalam mengkomunikasikan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kecamatan Karangpawitan, khususnya yang berkaitan dengan tingginya jumlah penduduk di Kecamatan Karangpawitan.

Merespon pernyataan di atas Bubu memberikan penjelasan sebagai berikut:

*Begini Pa, perlu diketahui dulu. Yang menjadi penyebab pertambahan penduduk itu bukan hanya dari tingginya kelahiran tetapi ada juga faktor migrasi atau perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain, dari satu daerah ke daerah lain. Nah, untuk Kecamatan Karangpawitan ini kan banyak sekali perumahan, yang saya tahu itu lebih dari 10 nama perumahan di sana itu. Jadi menurut saya tingginya jumlah penduduk di sana itu karena faktor migrasi. Ya, gampangnya begini. Saat ini saya orang Leles belum punya rumah, kemudian saya mengambil rumah di perumahan di Karangpawitan, Lalu saya mengupdate data kependudukan saya menjadi warga di sana, maka otomatis Kecamatan Karangpawitan itu warganya menjadi bertambah karena ada saya.*

Bubu mengungkapkan bahwa sejatinya pertambahan jumlah penduduk di Kecamatan Karangpawitan ini dipengaruhi oleh mobilitas penduduk atau migrasi dari kecamatan lain menuju Kecamatan Karangpawitan. Hal kongkret yang mudah dilihat adalah banyaknya hunian yang dipasarkan di kecamatan ini. Otomatis dengan adanya penawaran hunian yang cukup terjangkau, maka tidak sedikit masyarakat yang berpindah untuk menjadi warga baru untuk menghuni perumahan-perumahan di kawasan Karangpawitan ini. Dari segi kuantitas atau jumlah penduduk memang terjadi pertambahan penduduk ke Kecamatan Karangpawitan dan berkurangnya jumlah penduduk di kecamatan sebelumnya. Namun, keadaan ini

tidak serta merta menyebabkan tingginya angka kelahiran di Kecamatan Karangpawitan. Bubu memberikan keterangan lainnya, sebagai berikut:

*“Balik lagi ke yang tadi pa, jadi bila target sudah tercapai bahkan melampaui target berarti harapan untuk meraih angka TFR 2,1 itu bisa diwujudkan. Bila rata-rata PUS memiliki anak 2 atau 1 maka penduduk Indonesia akan tumbuh seimbang. Jadi kalau dihubungkan lagi dengan keadaan Kecamatan Karangpawitan, meskipun angka pertambahan penduduk di sini tinggi, tetapi untuk angka kelahiran di kecamatan ini relatif aman karena tidak sedikit masyarakat atau keluarga yang berpindah ke wilayah Kecamatan Karangpawitan ini merupakan akseptor KB di kecamatan sebelumnya.”*

Pernyataan informan di atas menyiratkan informasi bahwa terdapat dua entitas yang berbeda antara pertambahan penduduk dan pencapaian program KB. Hal ini berarti dalam konteks Kecamatan Karangpawitan, tingginya jumlah penduduk karena migrasi tidak berpengaruh terhadap pencapaian program KB. Informan lain, yaitu Tuti memberikan penjelasan terkait respons masyarakat terutama yang ada di dua desa, yaitu Desa Godog dan Tanjungsari:

*“Respon di desa Godog dan Tanjungsari sejauh ini cukup baik dan welcome untuk menjadi akseptor KB. Sebenarnya untuk sekarang mencari akseptor KB itu tidak susah seperti jaman dulu. Dulu kan katanya untuk mendapatkan 1 akseptor saja sulitnya minta ampun, bahkan ada yang bercerita PLKBnya sampai dikejar-kejar suaminya. Sekarang KB itu seperti kebutuhan masyarakat, tanpa KIE pun masyarakat secara sukarela menjadi akseptor. Jadi baik sih. Apalagi untuk warga perumahan, sebagian besar kan para pekerja, jadi mereka cukup paham terhadap pentingnya program KB.”*

Keadaan ini memberikan gambaran bahwasanya masyarakat di Kecamatan Karangpawitan khususnya yang ada di Desa Godog dan Tanjungsari tidak berkeberatan untuk menjadi peserta KB aktif, bahkan Tuti menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat di dua desa ini sudah menyadari pentingnya program pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Tentu saja hal ini memuluskan pekerjaan PKB/ PLKB sebagai *public relations*.

Pernyataan di atas didukung pula dengan pernyataan seorang akseptor yang bernama Yanti yang memberikan testimoni “*Alhamdulillah setiap ada kegiatan safari KB suka ada yang ikut baik itu ke IUD, Implant, dll. Tapi untuk di RW ini kebanyakan pada ikut KB suntik. Tetapi, ada juga yang memakai IUD.*” Dalam pernyataan ini Yanti menyebut istilah *safari KB*, kegiatan ini merupakan salah satu aktivitas *public relations* yang dilakukan para petugas lapangan. Kegiatan tersebut seringkali mendapatkan akseptor, baik KB IUD, Implant, suntik dll. Dalam kesempatan yang lain Yanti juga memberikan penjelasan sebagai berikut:

*“Biasanya para PKB/ PLKB suka mengunjungi Posyandu-Posyandu. Setiap sebulan sekali juga kita suka ada pertemuan Pos KB sub Pos KB dengan PLKB. Jadi begini, ketika PKB/PLKB memberikan penyuluhan tentang IUD, mereka juga mengajak saya yang saat ini sebagai akseptor KB IUD. Biasanya dengan adanya contoh, masyarakat itu lebih mudah menerima kalau IUD itu aman misalkan.”*

Informasi ini menerangkan cara atau metode yang dilakukan oleh para petugas lapangan ketika mereka melakukan aktivitas *public relations*. Jadi dalam hal ini, pelaksanaan *aktivitas public relations* yang dilakukan para petugas lapangan sudah berjalan dengan cara mengunjungi posyandu, pertemuan Pos KB dan Sub Pos KB dengan PLKB. Selain itu, untuk menguatkan calon akseptor, para PKB/ PLKB ini membawa kader atau akseptor yang sedang menggunakan alat kontrasepsi tertentu. Dengan kata lain, para petugas lapangan ini ingin meyakinkan calon akseptor dengan testimoni langsung.

Jadi, bila diuraikan dengan pernyataan sebelumnya khususnya terkait korelasi antara aktivitas *public relations* para PKB/ PLKB dengan tingginya jumlah penduduk di Kecamatan Karangpawitan sebenarnya tidak ada korelasi langsung atau hubungan sebab akibat. Hal ini disebabkan karena penambahan jumlah

penduduk di Kecamatan Karangpawitan ini bukan disebabkan karena tingginya angka kelahiran atau TFR tidak tercapai, tetapi lebih dikarenakan mobilitas penduduk yang melakukan migrasi. Sudah diketahui bersama bahwa banyaknya perumahan di Kecamatan Karangpawitan terutama yang berada di Desa Godog dan Tanjungsari telah menjadi daya Tarik bagi masyarakat atau pasangan suami istri yang belum memiliki hunian untuk mengambil rumah yang relatif terjangkau di kawasan ini.

Kelangsungan aktivitas *public relations* dalam mengkomunikasikan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilakukan oleh para PKB/ PLKB di Kecamatan Karangpawitan masih mampu menahan rata-rata angka kelahiran (TFR) dalam kisaran 2,3 meskipun tingginya migrasi penduduk ke wilayah ini. Jadi pertambahan penduduk ke wilayah ini bukan karena tingginya TFR (*Total Fertility Rate*) melainkan karena perpindahan penduduk. Jadi secara umum, meskipun jumlah penduduk terus bertambah ke Kecamatan Karangpawitan, sejauh ini aktivitas *public relations* dalam mengkomunikasikan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana cukup berhasil dalam mengajak para PUS untuk ikut serta dalam program KB. Ada yang memakai alat kontrasepsi IUD (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim), *Implant* (Susuk KB), Suntik, bahkan ada yang ikut tubektomi dan vasektomi (KB-Pria). Dalam konteks tersebut memang tidak terjadi permasalahan yang berarti.

Permasalahan terkait aktivitas *public relations* ini muncul tatkala tren program pengendalian penduduk dan keluarga berencana menyasar para remaja. Ada kelompok PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) dan program

GenRe (Generasi Berencana). Ketika ditanya mengenai prioritas program yang menyasar remaja, Tuti menyatakan bahwa:

*“Iya, ada, namanya PIK-R dan GenRe. Remaja juga harus diintervensi, diberikan KIE yang cukup. Tetapi untuk Kecamatan Karangpawitan ini baru ada 4 PIK-R, dan PIK-R yang aktif itu ada di Desa Tanjungsari.”*

Bila dilihat dari jumlah desa, Kecamatan Karangpawitan ini memiliki 20 desa/kelurahan. Idealnya jumlah PIK-R ini ada 20 sesuai dengan jumlah desa/kelurahannya. Dengan adanya 4 PIK-R di kecamatan ini memberikan isyarat bahwa PKB/PLKB masih perlu bekerja keras melaksanakan aktivitas *public relations* kepada para remaja mengingat program GenRe yang merupakan turunan dari program pengendalian penduduk dan keluarga berencana ini tidak kalah pentingnya dengan mendorong para ibu-ibu PUS untuk ber-KB. Bubu memberikan penjelasan tentang PIK-R, GenRe dan Duta GenRe:

*“Oke, bagus pertanyaannya. Jadi gini ya, duta genre itu merupakan ajang untuk mencari figur-figur remaja yang ideal masa kini. Remaja yang cerdas, berbakat, aktif, kreatif dan ada ciri khusus buat kita itu, yaitu terhindar dari tiga ancaman dasar: seks pra nikah, narkoba dan HIV/AIDS. Pesertanya boleh asal kategory remaja, biasanya dari kalangan siswa SMA dan universitas, kita seleksi sampai 3 hari. Ajang ini sudah ada sejak tahun 2008, jadi lumayan sudah lama. Jadi, memang benar saat ini remaja juga diharapkan berpartisipasi dalam program pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Tetapi tolong jangan berpikir pendek, bukan berarti anak remaja harus dipasang alat kontrasepsi KB, bukan begitu partisipasinya. Cara anak remaja itu adalah dengan berprestasi dalam dunia akademik dan non akademik, bercita-cita untuk berpendidikan tinggi, tidak menikah setelah lulus SMA, tidak melakukan seks pra nikah, terhindar dari bahaya narkoba, rajin beribadah, dll. Supaya anak remaja paham tentang apa yang boleh dan tidak boleh kami memiliki program yang khusus remaja, yaitu program GenRe (Generasi Berencana) dan PIK-R sebagai wadah organisasinya dan pemilihan duta GenRe yang merupakan apresiasi bagi remaja yang aktif menyuarakan program GenRe.”*

Pernyataan yang disampaikan oleh Bubu itu menyiratkan bahwa program pengendalian penduduk itu tidak hanya mengurus pasangan usia subur (PUS) untuk memakai alat kontrasepsi tertentu tetapi ada tugas lain yaitu promosi dan KIE program GenRe yang merupakan bagian dari program pengendalian penduduk dan keluarga berencana. PIK-R, Duta GenRe, dan GenRe itu sendiri merupakan bagian integral yang perlu disosialisasikan dan dipahami oleh para remaja. Jadi, mengurus remaja sama pentingnya dengan mengurus para pasangan usia subur yang ada saat ini. Berdasarkan informasi di atas, bila saat ini kita lengah dalam memberikan intervensi kepada remaja, boleh jadi kerja keras para PKB/ PLKB saat ini yang terus berupaya untuk mencapai target TFR 2,1 dan sampai saat ini baru sampai 2,4 menjadi mentah kembali bila remaja tidak diurus atau diberikan pemahaman yang cukup tentang konsep keluarga berencana.

Selain itu, Bubu juga menjelaskan tentang pentingnya program GenRe bagi remaja:

*“Remaja itu generasi penerus kami-kami di masa depan, remaja tidak boleh menjadi generasi yang lemah dan berkualitas rendah. Jadi keberadaan GenRe itu salah satu ikhtiar guna mencetak calon penerus bangsa, tentu kita tidak boleh main-main untuk menitipkan negara besar ini kepada generasi yang tidak berkualitas. Di samping itu, remaja masa kini merupakan calon suami atau istri di masa depan, besar harapan kami supaya para remaja yang nantinya menikah tersebut memiliki bekal yang cukup dan memadai terutama dalam aspek perencanaan berkeluarga dan penerapan 8 fungsi keluarga. Kami tentu tidak mengharapkan adanya berita tentang pengantin baru yang lekas bercerai atau kekerasan dalam rumah tangga. Jadi, intinya pada kualitas SDM, kita ingin membangun kualitas SDM-nya.”*

Pernyataan di atas menerangkan bahwa program GenRe memiliki tujuan yang mulia, yaitu ingin mencetak generasi remaja yang berkualitas supaya kelak di kemudian hari ada pemimpin yang benar-benar hebat dan berkualitas. Di samping

itu, dengan adanya program GenRe bagi remaja saat ini diharapkan remaja memiliki bekal yang cukup ketika ia menjalani bahtera kehidupan berumah tangga.

Keberadaan program GenRe dan PIK-R sebagai wadah organisasinya seharusnya direspon oleh para petugas lapangan. Aktivitas *public relations* harus sudah mulai diagendakan untuk menysasar para remaja. Yanti memberikan keterangan tentang kurangnya aktivitas *public relations* bagi anak remaja dengan pernyataan berikut:

*“Pernah waktu itu dijelaskan oleh PLKB, GenRe itu Generasi Remaja atau apa ya agak lupa. Oh iya Generasi Berencana. Jadi intinya itu program untuk remaja supaya terbebas dari triad Remaja; gak ada remaja yang seks bebas, kena narkoba, ada kesehatan reproduksi juga. PIK-R dulu pernah dibentuk bareng-bareng PLKB dan anak-anak IRMA di sini tetapi sekarang sudah tidak aktif lagi, mungkin harus membentuk lagi.”*

Keterangan tersebut memberikan informasi bahwa pengetahuan kader atau juga akseptor memang kurang begitu memahami secara komprehensif mengenai program GenRe, apalagi kelompok PIK-R-nya. Yanti menerangkan bahwa di lingkungannya pernah terbentuk kelompok PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja, tetapi kini menjadi tidak aktif. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak adanya aktivitas *public relations* yang berkelanjutan untuk membina kelompok PIK-R ini sehingga seiring berjalannya waktu aktivitas PIK-R ini menjadi tidak kelihatan.

#### **4.2.2. Merencanakan dan Menyusun Program**

Pada tahap ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana para petugas lapangan (PKB/ PLKB) merencanakan dan menyusun aktivitas *public relations* dalam

mengkomunikasikan program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Berdasarkan hasil kinerja capaian program KB pada tahun 2020, didapatkan hasil bahwa untuk capaian program yang berkaitan dengan realisasi antara target dan capaian akseptor KB, bisa dikatakan bahwa aktivitas *public relations* berjalan cukup efektif, namun ternyata aktivitas *public relations* ini belum berpengaruh banyak terhadap eksistensi Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) baik secara kuantitas maupun kualitas. Oleh sebab itu, pada tahap ini peneliti ingin memotret bagaimana biasanya para PKB/ PLKB merencanakan suatu program atau kegiatan teknis di desa binaannya khususnya yang berkenaan dengan pengelolaan program GenRe dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R). Pada dasarnya para PKB/ PLKB itu memiliki rencana kerja mulai dari tahunan sampai mingguan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Tuti sebagai informan dari unsur PKB:

*“Ada, seperti yang dijelaskan tadi. Kami memiliki rencana kerja tahunan, kemudian menjadi rencana kerja bulanan, dan mingguan .”*

Tuti mengungkapkan bahwa PKB/ PLKB memiliki rencana kerja yang jelas sebelum melakukan pekerjaannya. Namun, rupanya apa yang ada dalam rencana kerja tersebut hanya terdapat kegiatan-kegiatan yang konsentrasinya adalah pencapaian target peserta KB. Tuti menyampaikan keterangan sebagai berikut:

*“Tidak ada rencana khusus tentang PIK-R, biasanya kami menunggu penugasan khusus dari dinas untuk pembentukan PIK-R atau pembinaannya. Soalnya kan dinas punya tim khusus untuk PIK-R dan GenRe, yaitu Kirana. Mereka suka menjadwalkan pembinaan atau rencana pembentukan yang baru.”*

Ternyata urusan GenRe dan PIK-R luput dari tugas yang melekat pada para PKB/ PLKB. Para petugas lapangan ini tidak merancang atau merencanakan suatu agenda khusus untuk membina PIK-R yang ada atau membentuk PIK-R yang baru lagi.

Menurut Tuti yang notabene sebagai PKB, PIK-R itu langsung seolah diambil alih oleh pihak dinas, dalam hal ini DPPKBPPPA yang telah menugaskan Kirana (Komunitas Remaja Berencana) untuk melakukan KIE kepada remaja supaya membentuk PIK-R baik di lingkungan masyarakat maupun tingkat sekolah.

Berkenaan dengan perencanaan dan penyusunan program Bubu sebagai sekretaris dinas memberikan penjelasan sebagai berikut:

*“Untuk kegiatan public relations ya, sebetulnya public relations itu dilakukan oleh kami semua. Mulai dari unsur pimpinan dinas kepada staf, lalu kami juga menyampaikan informasi kepada para petugas lapangan yang ada di tingkat desa dan kecamatan. Dilanjutkan kembali public relationsnya oleh petugas lapangan kepada kader dan kelompok sasaran. Ya bisa 3 sampai 4 kali dalam sebulan, tetapi kini dilakukannya secara virtual. Di tingkat lapangan juga sepertinya tidak sesering sebelum pandemic, jadi harus menyesuaikan. Kepada remaja juga sama sih, aktivitas public relations di masyarakat itu menjangkau semua kelompok sasaran. Ada sasarannya PUS, ada juga remaja, tokoh agama, masyarakat, dll sama itu tugas PLKB atau petugas lapangan.”*

Pernyataan yang disampaikan oleh Bubu tersebut memberikan keterangan bahwa sejatinya semua unsur di lingkungan dinas melakukan aktivitas *public relations* secara berjenjang mulai dari pimpinan hingga staf dan sampai kepada para petugas lapangan di 42 kecamatan. Kemudian para petugas lapangan ini menyampaikan informasi kembali kepada para Pos KB, Sub Pos KB, PUS dll. Yang disampaikan adalah hal-hal yang berkaitan dengan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana secara holistik dan integratif. Pernyataan Bubu ini mengklarifikasi apa yang disampaikan Tuti sebelumnya bahwa pengelolaan PIK-R itu bukan tugas para petugas lapangan melainkan Kirana. Bubu menegaskan bahwa PLKB/ PKB itu melakukan aktivitas *public relations* kepada semua kelompok sasaran termasuk remaja di dalamnya.

Berkenaan dengan sistem perencanaan suatu kegiatan atau program Tuti sebagai PKB menerangkan bahwa PKB/ PLKB yang di lapangan itu tidak meminta atau mengusulkan suatu kegiatan kepada dinas, sebagai berikut:

*“Jarang ya a, biasanya program kegiatan itu kan diberikan atau diplot oleh Dinas langsung. Jadi kami hanya melaksanakan kegiatan apa pun yang diberikan oleh dinas.”*

Menurut Tuti dinas seolah memiliki kuasa penuh dalam merencanakan suatu kegiatan sekaligus penyediaan anggarannya. Menurut Tuti, para petugas di lapangan itu hanya sebatas menjalankan tugas yang diberikan. Hal yang berbeda disampaikan oleh Bubu selaku sekretaris dinas. Bubu memberikan keterangan sebagai berikut:

*“Program dan kegiatan itu disusun secara berkala dan berjenjang, bila tidak ada masukan atau permintaan dari bawah berarti kita mengadopsi langsung seluruh program dan kegiatan yang ada di dalam Renstra (Rencana Strategis). Masukan atau permintaan itu biasanya dari Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) mulai tingkat Desa hingga kabupaten. Bila ada masukan kegiatan tertentu pasti kita pertimbangkan.*

Menurut Bubu dinas itu cukup terbuka sebagaimana mekanisme yang ada, bila ada masukan dari pihak bawah, dalam hal ini para petugas lapangan bisa mengajukan suatu kegiatan kepada dinas pada saat pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa (Musrenbangdes). Di samping itu, keterangan lain dari Bubu terkait input-input kegiatan atau program yang menyiratkan aktivitas *public relations* dalam rencana kerja, sebagai berikut:

*“Ya betul, kalau secara eksplisit kami tidak memiliki program khusus tentang hal ini. Tetapi kita itu ada pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas para petugas yah, ada peningkatan wawasan substansi program pengendalian penduduk dan KB, ada juga pelatihan qtau bimtek tentang KIE massa,*

*manajemen krisis, bernegosiasi, dll. Menurut saya hal-hal tersebut menyiratkan praktik public relations.”*

Pernyataan di atas memberikan informasi yang jelas bahwa pada prinsipnya pihak dinas sudah berupaya dan berkomitmen dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya peningkatan kapabilitas para PKB/ PLKB dalam aspek *public speaking* mengingat tugas petugas lapangan ini sebagai *public relations*. Jadi dari aspek perencanaan sebenarnya dinas sudah mencoba melihat situasi untuk memfasilitasi kinerja para PKB/ PLKB khususnya dalam hal peningkatan kapasitas *public speaking* yang diwujudkan melalui rencana kerja. Ragam kegiatan yang memuat substansi *public speaking* ini sudah sewajarnya diimplementasikan dalam semua tugas yang melekat pada petugas lapangan. Baik tugas yang berhubungan dengan target dan capaian akseptor maupun tugas yang berhubungan dengan peningkatan wawasan remaja terhadap program Generasi Berencana (GenRe) dan PIK-R.

#### **4.2.3. Melakukan Tindakan dan Komunikasi**

Pada langkah ketiga ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana para petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) & petugas keluarga berencana (PKB) di lini lapangan mengimplementasikan aktivitas *aktivitas public relations* sebagaimana target program yang ditetapkan dinas dalam rencana kerja, kemudian para petugas lini lapangan ini menetapkan waktu/jadwal, memilih tempat serta menentukan bagaimana cara yang digunakan untuk melakukan aktivitas *public relations* dalam mengkomunikasikan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada tahun 2020. Mengawali pembahasan tentang bagaimana para PKB/ PLKB

melakukan aktivitas *public relations* kepada masyarakat, Bubu sebagai sekretaris dinas menyampaikan keterangan:

*“Ada berbagai cara, ada KIE individu ada KIE kelompok bahkan KIE massa. Kalau KIE individu itu biasanya dilakukan ketika mendapatkan calon akseptor di Posyandu, sedikit demi sedikit diberikan penjelasan, begitu juga KIE kelompok, penyampaian informasi kepada kelompok-kelompok, kalau KIE massa biasanya dilakukan ketika ada kegiatan sosialisasi GenRe di sekolah-sekolah.”*

Keterangan tersebut memberikan informasi bahwa aktivitas *public relations* yang dilakukan oleh para PKB/ PLKB itu lebih populer dengan nama KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi). KIE ini ada yang bersifat individu, KIE kelompok dan KIE massa. Dijelaskan juga tempat yang biasa dikunjungi oleh para PKB/ PLKB untuk melaksanakan aktivitas *public relations*, yaitu Posyandu. Bubu juga menerangkan bahwa ada KIE massa yang biasanya dilakukan untuk mensosialisasikan program GenRe ke sekolah. Hal ini berarti program GenRe merupakan bagian dari tugas yang melekat pada PKB/ PLKB untuk melakukan aktivitas *public relations*. Dengan melihat keterangan tersebut PKB/ PLKB ini berperan sebagai komunikator utama kepada masyarakat, meskipun pada praktiknya melibatkan mitra kerja, seperti kader.

Informan lain, yaitu Tuti sebagai perwakilan PKB/ PLKB menjelaskan terkait bagaimana biasanya praktik *public relations* itu dilakukan untuk mengkomunikasikan program pengendalian penduduk, sebagai berikut:

*“Kalau kepada akseptor, saya biasanya datang ke Posyandu saja, di sana kan kaum ibu suka berkumpul sambil membawa bayi atau balitanya. Di sana lebih gampang untuk melakukan KIE. Kalau GenRe, GenRe itu kan terbagi dua ada yang sasaran remaja saja, yaitu kelompok PIK-R, ada juga keluarga yang memiliki remaja, yaitu BKR. Jadi sasarannya orang tua yang memiliki remaja. Biasanya langsung saja melakukan penjadwalan, lalu meminta ke para kader*

*untuk menyiapkan kelompok BKR/ PIK-R untuk mengikuti pertemuan, sosialisasi dll. Jadi ini kan bagaimana Dinas yang menugaskan kami untuk mengadakan KIE, pembinaan dengan mereka. “*

Pernyataan tersebut menerangkan bahwa cara yang sering digunakan untuk melakukan aktivitas *public relations* kepada masyarakat. Bila itu menyasar calon akseptor, biasanya Posyandu menjadi tempat favorit dengan pertimbangan kepraktisan. Tuti juga menyampaikan informasi bahwa KIE atau aktivitas *public relations* tidak hanya dilakukan kepada kaum ibu, tetapi remaja juga. Ada istilah KIE program GenRe, kelompok PIK-R, kelompok BKR. Diberikan penjelasan juga bahwa BKR itu menyasar orang tua yang memiliki remaja. Terkait cara KIE yang biasanya dilakukan kepada remaja, Tuti mengatakan bahwa sebelum pelaksanaan KIE, ditetapkan jadwal yang disepakati antara kesiapan PKB/ PLKB dan anak remaja, kemudian melibatkan kader untuk menyiapkan baik kelompok PIK-R maupun BKR. Perlu digarisbawahi bahwa KIE kepada remaja ini lebih kepada penugasan khusus dari dinas. Informasi ini menyiratkan bahwa PKB/PLKB ini tidak memiliki agenda rutin untuk mengelola kelompok PIK-R, BKR bahkan pemahaman GenRe kepada para remaja. Dari sisi aktivitas *public relations* memang ada pertemuan atau KIE kepada kaum remaja, tetapi rupanya penggerakkan atau frekuensi KIE baik dalam bentuk sosialisasi maupun pembinaan kelompok dirasa kurang, sebagaimana yang dikatakan Tuti, para PKB/ PLKB itu bergerak untuk mengadakan KIE kepada remaja bila ada penugasan atau perintah khusus.

Hal senada diterangkan oleh Yanti, sebagai kader sekaligus akseptor memberikan informasi sebagai berikut:

*“Ya gitu we a, biasanya kan lewat Posyandu, sekalian, tetapi ada juga pertemuan rutin Pos KB Sub Pos KB dengan PLKB, di sana disampaikan informasi program. Kalau GenRe ya suka ada sekali-sekali pertemuan dengan*

*anak remaja masjid atau karang taruna, diberikan penjelasan tentang kespro, PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan), dll.”*

Yanti mengungkapkan bahwa PKB/ PLKB ini melakukan aktivitas *public relations* dengan mengunjungi Posyandu. Di samping itu, para PKB/ PLKB juga suka mengadakan pertemuan rutin bersama para Pos KB dan Sub Pos KB, pertemuan ini membahas informasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Yanti juga menegaskan bahwa pertemuan untuk membahas program GenRe itu hanya dilakukan sekali-sekali atau tidak sering. Biasanya sosialisasi GenRe ini menasar anak remaja masjid atau karang taruna. Jadi, secara substansi GenRe memang disampaikan oleh para PKB/PLKB ini tetapi pernyataan Yanti ini tidak memberikan gambaran bagaimana mengukur pemahaman para anak remaja tersebut terhadap program bila anak remaja yang sudah diberikan KIE itu tidak terorganisasi melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R). Jadi, aktivitas *public relations* para PKB/ PLKB ini hanya sebatas kegiatan penyampaian informasi tentang program GenRe (Generasi Berencana) saja tidak ada tindak lanjut baik untuk membentuk PIK-R bagi yang belum ada maupun pembinaan yang intensif bagi kelompok yang sudah terbentuk.

#### **4.2.4 Melakukan Evaluasi**

Pada tahap keempat ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana para Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/ PLKB) melaksanakan evaluasi terkait seluruh kegiatan yang dilakukan dalam upaya pelaksanaan aktivitas *public relations* dalam mengkomunikasikan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, termasuk di dalamnya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku atasan langsung para PKB/ PLKB yang bertugas di lini lapangan ini. Adapun hasil evaluasi dari pelaksanaan aktivitas *public relations* berupa KIE (Komunikasi, Informasi dan edukasi) program pengendalian penduduk dan keluarga berencana menurut Bubu sebagai informan pertama:

*“Ada, di lapangan itu ada pertemuan yang disebut staff meeting biasanya hari senin setelah briefing dengan pihak kecamatan. Sekarang Namanya radalgram, rapat pengendalian program, dalam pertemuan itu dibahas capaian dan target, desa mana yang belum mencapai target, desa mana yang melampaui target dsb. Pun di tingkat kabupaten, mereka itu kan memberikan laporan bulanan, 2 bulan sekali kami mengundang mereka ke kabupaten untuk mereview atau mengevaluasi program.”.*

Bubu mengungkapkan bahwa kegiatan untuk mengevaluasi aktivitas *public relations* itu telah dilakukan secara berkala dan berjenjang mulai dari tingkat , desa, kecamatan dan tingkat kabupaten. Kegiatan evaluasi tersebut dilakukan melalui pertemuan, ada yang disebut *staff meeting* dan rapat pengendalian program (radalgram) di tingkat lini lapangan. Begitu juga di tingkat kabupaten, dinas dalam hal ini akan menagih rekap capaian dan target program pengendalian penduduk dan keluarga berencana dari tingkat kecamatan atau lini lapangan. Adapun hasil dari advokasi dan sosialisasi menurut Tuti sebagai informan kedua:

*“Ada, kan kami itu harus membuat laporan bulanan, laporan F1, F2. Jadi supaya bisa mengisi laporan tersebut kami perlu mencatatnya. Ada juga yang berbentuk notulen kegiatan, jadi kami itu dituntut RR (Reporting & Recording) nya.”.*

Menurut Tuti pelaksanaan kegiatan penggerakan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang di dalamnya tersirat aktivitas *public relations* tidak berjalan begitu saja, setelah kegiatan itu selesai atau pulang begitu saja. Pernyataan Tuti menyiratkan informasi bahwa setelah aktivitas *public*

*relations* itu selesai, para petugas lini lapangan dalam hal ini PKB/ PLKB bergegas melakukan pencatatan pelaporan terkait capaian yang dihasilkan. Hal ini dilakukan karena secara periodik dinas akan membuat laporan bulanan perkembangan capaian program pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dokumen-dokumen yang disebutkan Tuti tersebut akan menjadi bahan utama dalam pembuatan laporan bulanan capaian program di tingkat kabupaten oleh dinas. Hal ini dikonfirmasi oleh Bubu sebagai informan utama selaku sekretaris dinas yaitu:

*“Ada, kami meminta laporan bulanan ke tiap kecamatan, nanti ada koordinator petugas atau UPT yang datang ke dinas menyerahkan laporan bulanan. Laporan itu sangat lengkap terkait target dan capaian program yang isinya seputar capaian alat kontrasepsi, kelompok ketahanan keluarga, PIK-R BKR dll semua ada dan kami rekap untuk membuat laporan umpan balik.”.*

Bubu memberikan informasi terkait alur atau mekanisme pembuatan laporan bulanan capaian program dari tingkat kecamatan hingga kabupaten. Bubu juga menjelaskan bahwa laporan bulanan itu memuat capaian dan target program yang komprehensif. Penjelasan yang disampaikan Tuti dan Bubu ini memberikan gambaran bahwa penggerakkan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana di lini lapangan itu selalu dievaluasi secara terukur.

Setelah permintaan laporan bulanan capaian program oleh pihak dinas dan dipenuhi oleh PKB/ PLKB sebagai petugas lapangan. Isi laporan tersebut dibahas dan didiskusikan secara mendalam dalam rapat pengendalian program di tingkat lapangan atau tingkat kabupaten yang dilakukan dinas. Rapat ini pada intinya ingin mengetahui permasalahan apa yang terjadi terkait capaian program pengendalian penduduk dan keluarga berencana di tingkat kecamatan dan desa masing-masing bila capaian program masih rendah. Bubu memberikan informasi terkait hal ini.

*“Kita berikan motivasi supaya para PLKB/PKB lebih giat lagi dalam melaksanakan pekerjaannya. Kita cari tahu apa yang menjadi penyebab capaian menjadi rendah atau tidak mencapai target, kita coba diskusikan supaya ada solusi yang bisa diterapkan.”*

Bubu menerangkan bahwa pendekatan yang dilakukan untuk mengevaluasi adalah melalui pemberian motivasi. Motivasi ini diberikan kepada kecamatan yang capaiannya masih rendah dibanding target yang diberikan. Rapat evaluasi juga mencoba untuk menghadirkan solusi atas permasalahan yang menjadi penyebab rendahnya capaian program. Dalam kesempatan yang lain Tuti memberikan sedikit gambaran terkait solusi atau upaya penyelesaian bila ada desa atau RW yang belum mencapai target program.

*“Bila hal itu terjadi, kami biasanya suka mengadakan RAPSUS (Garapan Khusus), jadi seperti tim khusus lagi. Misalnya RW 1 capaiannya masih rendah, kami berembuk siapa saja dari para anggota PKB/PLKB yang ditugaskan untuk mengintervensi RW tersebut, digarap secara khusus.”*

Tuti menuturkan bahwa biasanya koordinator PKB/PLKB membentuk tim khusus untuk menggarap RW atau desa yang capaiannya belum terpenuhi.

Bentuk evaluasi yang dilakukan tidak hanya mengukur capaian kinerja program dari sisi pendekatan administratif. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Garut terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas baik dari sisi substansi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana maupun dari segi keterampilan berkomunikasi mengingat para PKB/ PLKB ini adalah *public relations* program keluarga berencana dan pengendalian penduduk beserta turunan programnya seperti GenRe (Generasi Berencana). Bubu memberikan keterangan sebagai berikut.

*“Ada, Kita memiliki Balai Diklat BKKBN Jawa Barat, jadi seringkali para petugas kami itu diberikan bimbingan teknis atau pelatihan-pelatihan yang menunjang pemahaman substansi program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga Keterampilan Berkomunikasinya. Seperti ada bagaimana penyuluhan GenRe kepada remaja, bagaimana membentuk PIK-R, bagaimana melaksanakan KIE masa, KIE individu dan KIE kelompok. Jadi sering sih para petugas lapangan itu mendapatkan pelatihan-pelatihan yang di dalamnya termasuk ada unsur meningkatkan keterampilan berkomunikasi.”*

Bubu memaparkan bahwa para PKB/ PLKB ini sering diberikan pelatihan atau bimbingan teknis guna pemahaman terkait substansi programnya bertambah, pun keterampilan berkomunikasi meningkat. Pelatihan atau bimbingan teknis ini mencakup genre di dalamnya.

Hal senada diungkapkan oleh Tuti sebagai salah satu PKB yang bertugas di Kecamatan Karangpawitan.

*“Ada a, biasanya minimal satu kali dalam satu tahun itu ada pelatihan peningkatan capacity building, ada juga bimbingan teknis terkait pengelolaan pelaporan dan pencatatan (RR) disebutnya, ada juga cara melakukan KIE yang efektif. Pelatihan ini biasanya dilakukan oleh tim widyaiswara Balai Diklat KB.”*

Jadi, dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut bekerjasama dengan Balai Diklat KB Provinsi Jawa Barat secara berkelanjutan melakukan pelatihan atau Bimbingan Teknis untuk meningkatkan kinerja para petugas baik dari sisi keterampilan berkomunikasi atau *public relations* maupun segi substansi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Apabila ditinjau dari aspek capaian program GenRe (Generasi Berencana) yang merupakan program turunan dari program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Tuti memberikan pernyataan sebagai berikut:

*“Untuk desa Tanjungsari ada 1 PIK-R, tadi sudah disebutkan di Karangpawitan ini baru terbentuk 4 PIK-R, jadi belum di semua desa/kelurahan itu ada semua.”*

Tuti menyampaikan bahwa sampai dengan tahun 2020 itu baru ada 4 PIK-R dan dari keempat PIK-R itu terdapat di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangpawitan.

Ketika peneliti menanyakan tentang keaktifan dari PIK-R tersebut, Tuti memberikan keterangan:

*“Yang aktif itu PIK-R di Desa Tanjungsari, yang lainnya masih perlu digerakkan oleh para PKB/PLKB belum mampu menjalankan aktivitas PIK-R secara mandiri ala remaja.”*

Tuti menyatakan bahwa dari keempat PIK-R itu hanya ada 1 PIK-R yang aktif, yaitu PIK-R yang berada di Desa Tanjungsari. Saat itu peneliti menanyakan lebih jauh apa yang menjadi penyebab tingkat keaktifan dari PIK-R yang ada 4 itu hanya

1. Kemudian tuti memberikan keterangan lanjutan, sebagai berikut:

*“Sebenarnya anak-anak remaja di Karangpawitan ini cukup antusias, tertarik ketika ada penyuluhan GenRe itu. Apalagi yang penyuluhannya duta GenRe, itu sangat bagus responnya. Bagaimana ya a, anak-anak di sini teh susah berkumpulnya. Ada yang sekolah, sibuk organisasi juga di luar. Kami juga kerepotan ya a kalau tiap ada kumpulan remaja harus ikut ngumpul dan memberikan arahan. Ya kami para PKB/ PLKB itu sekali-sekali saja. Kan kami juga ada tugas lain, mengurus calon akseptor, memfasilitasi pelayanan, belum kelompok ketahanan keluarga lainnya. Jadi kami ingin PIK-R itu bisa berjalan mandiri setelah diberikan arahan dan penyuluhan. Bukan kami gamau ya a terus-terusan mendampingi PIK-R tapi karena tugas kami yang cukup banyak. Jadi sementara ini, kalau misalnya ada permintaan kumpulan oleh PIK-R kami suka ajukan ke dinas supaya PIR-R di sini ditangani Kirana. Paling gitu sih a, kami tetap berkomunikasi baik kok dengan remaja-remaja di desa kami.”*

Pernyataan yang diberikan Tuti memberikan keterangan bahwa aktivitas *public relations* dalam bentuk penyuluhan program GenRe itu sudah dilakukan.

Penyuluhan itu hanya sekali-sekali tidak terus menerus, namun ketika ditanya kepada kualitas dan kuantitas PIK-R, PKB memberikan keterangan bahwa mereka tidak bisa bila harus mendampingi seluruh kegiatan PIK-R karena tugas PLKB itu

tidak hanya melakukan aktivitas *public relations* kepada anak remaja saja. Tuti juga memberitahu bahwa untuk pembentukan dan pembinaan PIK-R itu biasanya dilakukan oleh Komunitas Remaja Berencana (Kirana) yang merupakan kelompok remaja bentukan Dinas untuk membantu sosialisasi dan penggerakkan program GenRe dan PIK-R.

Merespon pernyataan di atas, peneliti pun kemudian mengajukan pertanyaan yang sama terkait program GenRe dan eksistensi PIK-R di Kecamatan Karangpawitan dan ruang lingkup Kabupaten Garut pada umumnya. Bubu memberikan keterangan sebagai berikut:

*“Oh sudah mewawancarai PKB di sana ya. Begini a/ pa sebenarnya penyuluhan GenRe, PIK-R itu bagian dari tugas yang tidak bisa dipisahkan oleh PKB/ PLKB. Sebenarnya kami dan personel kami di lapangan itu terus mengupayakan dan mencoba mengintervensi para remaja baik di lingkungan masyarakat atau lini lapangan atau pun di sekolah-sekolah. Sejauh ini sampai hari ini kami akui kalau hanya sekedar menyampaikan informasi atau public relations kepada anak remaja di masyarakat bahkan di sekolah kami tidak mengalami kendala berarti. Kami bisa masuk ke karang taruna, remaja masjid dan sekolah yang sebagian besar menyambut baik kedatangan tim sosialisasi kami, biasanya Tim Kirana/ Pokjayan kalau dulu Namanya. Tetapi tatkala kami mencoba mengupayakan pembentukan PIK-R lebih jauhnya itu pembinaannya. Sebenarnya membentuknya gampang a, menetapkan ketua, sekretaris, bendahara dsb tidak sulit, tapi ketika kami ingin mengelolanya cukup kerepotan. Pertama, dari sisi anggota PIK-R itu kan masih ada sekolah, kuliah, perbedaan waktu, bahkan di kampung-kampung itu suka ada remaja yang sudah kerja seperti berdagang dll. Mereka itu antusias dengan genrenya tapi mereka itu belum siap untuk berorganisasinya karena alasan satu dan lainnya. Jadi kami akui kami masih terkendala dalam pengelolaannya, penggerakkan genre itu masih terus kami gencarkan, duta genre terus kami adakan, pelatihan tentang genre PIK-R pun suka ada. Mudah-mudahan ke depannya PIK-Rnya bisa aktif dan dikenal secara luas.”*

Bubu memberikan penjelasan bahwa pada intinya aktivitas *public relations* sudah dilakukan, program GenRe sudah disampaikan kepada remaja baik di organisasi masyarakat maupun di sekolah, namun beliau mengakui bahwa sejauh ini aktivitas

*public relations* kepada remaja ini belum maksimal dan komprehensif, sampai saat ini pihak dinas dan PKB/ PLKB masih terus mengupayakan formulasi yang tepat bagaimana pengelolaan PIK-R ini bisa aktif dan berjalan seperti organisasi yang lain.

### **4.3. Pembahasan Hasil Penelitian**

Dalam sub bab ini, peneliti akan mempertegas bahasan penelitian berdasarkan hasil data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif (Pengamatan berperan serta) terkait aktivitas *public relations* dalam mengkomunikasikan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kecamatan Karangpawitan yang dikaitkan dengan landasan teori. Selain itu di pembahasan penelitian ini menyajikan hasil wawancara dengan narasumber serta interpretasi peneliti tentang hasil penelitian dengan melakukan analisis terkait teori dan konsep yang sudah dipaparkan di BAB II.

#### **4.3.1 Mendefinisikan masalah**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti mendapatkan hasil bagaimana para petugas lapangan (PKB/ PLKB) termasuk Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendefinisikan masalah sebelum melaksanakan aktivitas *public relations* dalam mengkomunikasikan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Adanya selisih antara harapan dan kenyataan dikatakan sebagai suatu masalah. Berdasarkan keterangan dari beberapa informan berpendapat bahwa masalahnya

terletak pada pengelolaan pusat informasi dan konseling remaja baik itu yang ada di lingkungan masyarakat maupun yang telah terbentuk di lingkungan sekolah dan universitas. Sebagaimana keterangan dari para informan, di Karangpawitan itu hanya ada 4 PIK-R, sedangkan Karangpawitan itu memiliki cakupan wilayah yang luas, terdiri dari 20 desa/ kelurahan. Idealnya menurut dinas itu minimal 1 desa ada 1 PIK-R. Jadi, masalah yang ada di Kecamatan Karangpawitan ini bukanlah berkaitan dengan aktivitas *public relations* para PKB/ PLKB kepada pasangan usia subur (PUS). Sebagaimana informasi yang didapatkan dari para informan kemudian dikonfirmasi oleh data capaian program pengendalian penduduk dan keluarga berencana sampai bulan Desember tahun 2020, hasil kinerja para PKB/ PLKB dalam mengkomunikasikan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam konteks penggerakkan masyarakat untuk menjadi akseptor KB, melayani dan memfasilitasi calon akseptor KB, memberikan KIE dan konseling kepada calon akseptor bisa dikatakan berhasil, tetapi tidak untuk program GenRe (Generasi Berencana) yang merupakan salah satu turunan program pengendalian penduduk. Sebagaimana tuturan para informan, aktivitas *public relations* dalam wujud KIE program GenRe itu sudah disampaikan kepada remaja, namun *output* program GenRe ini, yaitu terbentuk dan terkelolanya PIK-R belum terealisasi dengan maksimal.

Berdasarkan pengamatan peneliti pada saat ikut serta dalam kegiatan di Balai Penyuluh KB, orientasi pembahasan target program itu lebih didominasi dengan pembicaraan tentang target akseptor KB yang harus dicapai. Terkait pengelolaan kelompok-kelompok binaan program seperti Bina Keluarga Balita

(BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia dan PIK-R, tidak ada pembahasan yang begitu serius. Semua anggota rapat lebih disibukkan dengan strategi bagaimana untuk memberikan intervensi kepada calon akseptor. Jadi, berdasarkan pengamatan ini, ada kecenderungan atau keberpihakan para PKB/ PLKB untuk lebih memprioritaskan pencapaian target dan sasaran program pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam aspek pencapaian peserta KB aktif dan peserta KB baru yang memakai alat kontrasepsi.

Hasil temuan ini sesuai teori bahwa langkah pertama untuk melakukan kegiatan program komunikasi yang telah direncanakan, yakni dimulai dengan penemuan masalah. Tanpa penemuan masalah maka kegiatan yang dilakukan bisa menjadi tindakan pemborosan, bahkan bekerja tanpa masalah bisa diibaratkan berjalan tanpa arah. Masalah adalah selisih antara harapan dan kenyataan, atau selisih antara aspirasi dan realistis (Cangara, 2014:105).

Aktivitas *public relations* dalam mengkomunikasikan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah kegiatan rutin bagi para PKB/ PLKB yang bertugas di lini lapangan. Mereka sehari-hari berhubungan langsung dengan masyarakat, paling tidak para PKB/ PLKB ini berkomunikasi dengan masyarakat melalui kader, melakukan KIE dan konseling kepada calon akseptor. Berdasarkan pengamatan peneliti, para petugas lapangan ini lebih sering berhubungan langsung dengan kader. Jadi, dalam hal ini para kader ini diberikan KIE supaya memiliki keterampilan membujuk calon akseptor dan memiliki pengetahuan yang cukup ketika calon akseptor itu bertanya seputar program pengendalian penduduk dan keluarga berencana atau alat kontrasepsi itu sendiri.

Para petugas lapangan ini terus bergerak melakukan aktivitas *public relations* karena dinas telah menetapkan target program tiap kecamatan. Namun, untuk pembinaan kelompok-kelompok ketahanan keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, dll) peran kader itu terbatas. Para kader ini kurang diberikan pemahaman yang cukup terutama program Generasi Berencana (GenRe) dan kelompoknya, yaitu PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja).

Pada langkah pertama ini, peneliti menguraikan penyebab-penyebab dari masalah aktivitas *public relations* dalam pembentukan dan pengelolaan pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R) pada tahun 2020 tidak mencapai hasil sebaik mungkin. Adapun penyebab-penyebab dari masalah tersebut dijadikan acuan oleh Dinas PPKBPPPA untuk memperbaiki usaha yang akan dilakukan pada tahun berikutnya sebagai upaya untuk memaksimalkan peran dan fungsi aktivitas *public relations* dalam pembentukan dan pengelolaan Pusat dan Informasi Konseling Remaja (PIK-R) di Kecamatan Karangpawitan.

Program generasi berencana (GenRe) yang di dalamnya membahas tentang pengenalan kesehatan reproduksi, pubertas penyiapan berkeluarga bagi remaja, bahaya narkoba merupakan program yang terus disosialisaikan kepada remaja khususnya di Kecamatan Karangpawitan. Bila dikatakan baru sebenarnya tidak, sejak tahun 2008 program GenRe itu sudah mulai disosialisaikan melalui acara pemilihan duta GenRe. Namun, rupanya keberhasilan aktivitas *public relations* program ini tidak mencapai target yang diharapkan, karena ukuran keberhasilan program ini adalah terbentuknya dan terkelolanya PIK-R dari komunitas remaja yang diberikan penyuluhan atau KIE GenRe. Berdasarkan observasi peneliti,

adapun yang menjadi penyebab dari masalah upaya pembentukan dan pengelolaan pusat informasi dan konseling remaja di jalur pendidikan pada tahun 2020 tidak mencapai hasil sebaik mungkin dikarenakan para PKB/ PLKB ini hanya melakukan KIE tentang substansi program GenRe, tidak disertakan penjelasan mengenai mekanisme pembentukan, kaderisasi dan pengelolaan PIK-R bagi yang sudah terbentuk. Di samping itu, tidak adanya mentoring, pendampingan khusus beberapa kali dan monitoring secara berkala bagi anggota PIK-R yang baru terbentuk karena padatnya para PKB/ PLKB untuk mengurus akseptor. PLKB/ PKB ini lebih memilih bahwa untuk pembentukan dan pengelolaan PIK-R ini ditangani oleh Komunitas Remaja Berencana (Kirana) sebagai kelompok khusus yang terdiri dari para remaja pilihan untuk mensosialisasikan program GenRe di Kabupaten Garut.

Hasil temuan yang telah dipaparkan diatas sesuai dengan hasil wawancara dengan narasumber utama yaitu Yayan Waryana yang mengungkapkan bahwa masalah itu akan terlihat atau terdefinisi dengan baik bila ada pemantauan atau monitoring. Begitu pula dalam konteks PIK-R, seharusnya para PKB/ PLKB itu melakukan aktivitas *public relations* dalam bentuk pemantauan dan pembimbingan. Dengan cara tersebut, masalah yang kecil bisa ditutup dan diselesaikan. Jadi, melalui kegiatan monitoring tersebut kekurangan, atau masalah yang terjadi di PIK-R itu bisa diketahui dan disuguhkan solusinya.

Selain menemukan masalah, langkah pertama ini menyelidiki dan memantau pengetahuan, opini, sikap dan perilaku pihak-pihak yang terkait dengan, dan yang dipengaruhi oleh, tindakan dan kebijakan organisasi (Cutlip, Center, & Broom, 2011, hal. 320). Sebelum merencanakan aktivitas *public relations*

hususnya program yang menyoar remaja, yaitu program GenRe, tidak ada penyelidikan atau riset secara khusus yang dilakukan oleh dinas, dalam hal ini DPPKBPPPA Kabupaten Garut terkait bagaimana pengetahuan maupun opini dari orang atau publik sasaran terkait eksistensi pusat informasi dan konseling remaja.

Berdasarkan pengamatan peneliti, orang atau pihak-pihak yang terkait untuk dipengaruhi dalam rangka pembentukan dan pengelolaan pusat informasi dan konseling remaja tidak mengetahui bagaimana menjalankan pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R). Terlebih mengetahui tugas, peran dan fungsi Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) itu sendiri. Berdasarkan informasi dari informan ketidaktahuan ini dikarenakan aktivitas *public relations* yang dilakukan lebih berfokus pada substansi program GenRe yang di dalamnya ada materi-materi seputar kesehatan reproduksi remaja, penyiapan berkeluarga bagi remaja, pendewasaan usia perkawinan dan wawasan kependudukan.

Berdasarkan informasi yang komprehensif dari narasumber utama yaitu Kepala Dinas PPKBPPPA Kabupaten Garut, menyatakan bahwa ketidaktahuan publik sasaran mengenai pusat informasi dan konseling remaja ini karena ada faktor dari luar, yaitu tidak adanya perangkat hukum yang mewajibkan terbentuknya Pusat Informasi dan Konseling baik di jalur Pendidikan maupun jalur masyarakat. Menurut KIE atau *public relations* untuk membentuk PIK-R itu sifatnya anjuran sehingga sosialisasinya pun berlangsung secara persuasif. Narasumber memberikan contoh dengan keberadaan karang taruna di desa-desa dan adanya Palang Merah Remaja (PMR) di sekolah-sekolah. Keberadaan organisasi-organisasi kepemudaan dan remaja tersebut dikarenakan ada produk hukum berupa peraturan yang

dikeluarkan oleh kementerian terkait. Oleh karena itu, sampai saat ini advokasi terus dilakukan supaya diterbitkannya peraturan bupati yang menaungi keberadaan dan aktivitas Pusat dan Informasi Konseling Remaja (PIK-R). Pernyataan yang disampaikan oleh narasumber ini menarik, ternyata ada hal lain yang menyebabkan tidak efektifnya aktivitas *public relations* khususnya untuk membentuk dan mengelola Pusat Informasi dan Konseling Remaja, yaitu tidak ketiadaan produk hukum yang mengharuskan adanya Pusat Informasi dan Konseling Remaja.

#### **4.3.2 Merencanakan dan Menyusun Program**

Berdasarkan informasi dari para informan bisa diketahui bahwa baik Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA) Kabupaten Garut dan para PKB/ PLKB sebagai petugas lapangan memiliki sistem perencanaan. Dinas PPKBPPPA membangun sistem perencanaan dengan mengikuti mekanisme sebagaimana perangkat daerah atau dinas lainnya. Sistem perencanaan ini berlangsung secara berkala. Setiap program dan kegiatan yang akan dilakukan harus termuat dalam dokumen rencana kerja.

Informasi yang dikumpulkan dalam langkah pertama digunakan untuk membuat keputusan tentang program publik, strategi, tujuan, tindakan dan komunikasi, taktik dan sasaran. Langkah ini akan mempertimbangkan temuan dari langkah dalam membuat kebijakan dan program organisasi. Langkah kedua ini akan menjawab pertanyaan “berdasarkan apa yang kita tahu tentang situasi, dan

apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita ubah, dan apa yang harus kita katakan?” (Cutlip, Center, & Broom, 2011, hal. 320).

Narasumber mengemukakan bahwa aktivitas *public relations* yang secara implisit termuat dalam berbagai kegiatan penggerakan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada tahun 2020, sejatinya merupakan realisasi dari rencana kerja yang dibuat pada tahun sebelumnya. Dalam menyusun seluruh program dan kegiatan berkenaan dengan aktivitas *public relations* untuk mengkomunikasikan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dinas mengakomodir semua kegiatan teknis yang disusun dan diusulkan oleh tiap-tiap kepala seksi. Begitu pula tiap-tiap seksi yang ada di bidang teknis mengakomodir berbagai masukan yang muncul dari tingkat lini lapangan untuk diangkat dan dilaksanakan sebagai program dan kegiatan untuk tahun berikutnya. Di samping itu, seksi-seksi yang ada di tiap bidang membuat program dan kegiatan berbasis prioritas program yang diamanatkan oleh kepala daerah.

Berdasarkan informasi dari narasumber utama, bahwa pada tahun 2019 dinas memiliki program dan kegiatan yang memuat aktivitas *public relations* program pengendalian penduduk dan keluarga berencana untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2020. Tetapi, hal yang tidak disangka-sangka pun terjadi, pandemi COVID-19 telah memaksa pemerintah untuk melakukan penyesuaian dan kebijakan pergeseran atau pengalihan anggaran. Kebijakan ini tentu saja berpengaruh langsung pada implementasi aktivitas *public relations* yang dilakukan oleh para PKB/ PLKB secara langsung. Berkurangnya intensitas pertemuan dengan para kader, calon akseptor, KIE GenRe, dll sedikit banyaknya

telah berpengaruh pada kuantitas dan kualitas aktivitas *public relations* kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti, pada tahun 2020 aktivitas *public relations* antara PKB/ PLKB dengan kader atau calon akseptor itu sangat terbatas, Posyandu pun menjadi sepi karena protokol kesehatan yang tidak menghendaki keramaian. Sehingga terjadi penyesuaian, misalnya PKB/ PLKB atau kader yang mengunjungi rumah calon akseptor.

Perencanaan ini tidak hanya terjadi dalam ruang lingkup dinas saja, PKB/ PLKB juga melakukan perencanaan. Perencanaan ini menitikberatkan pada aspek target dan capaian yang diberikan oleh dinas kepada para PKB/ PLKB. Dinas memberikan target capaian makro dan mikro program pengendalian penduduk dan keluarga berencana kepada seluruh kecamatan di Kabupaten Garut. Rencana teknis lainnya dilakukan juga oleh para PKB/ PLKB di Kecamatan Karangpawitan, setelah mereka memiliki target yang jelas dari dinas, mereka pun bergeas untuk melakukan penjadwalan baik itu pelayanan akseptor KB, diseminasi program, KIE program GenRe, pembinaan kelompok ketahanan keluarga, dll.

Pernyataan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa perencanaan dan penyusunan program khususnya yang memuat aktivitas *public relations* program pengendalian penduduk dan keluarga berencana sejatinya sudah ada dan termuat dalam dokumen perencanaan, ada yang disebut Renja (Rencana Kerja Tahunan), ada juga perencanaan 5 tahunan atau Renstra (Rencana Strategis). Program pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan program besar yang memiliki ragam kegiatan teknis yang banyak, termasuk di dalamnya ada kegiatan yang menasar kaum remaja, yaitu GenRe (Generasi Berencana) dan PIK-R (Pusat

Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R). Disamping itu, para PKB/ PLKB memiliki rencana kerja teknis yang di dalamnya memuat agenda dan jadwalisasi guna mencapai target yang telah ditetapkan.

#### **4.3.3 Melakukan Tindakan dan Komunikasi**

Berdasarkan program yang memuat aktivitas *public relations* yang telah direncanakan dan disusun dilangkah kedua, selanjutnya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA) Kabupaten Garut, dalam hal ini para PKB/ PLKB mengimplementasikan rencana program pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang memuat di dalamnya aktivitas *public relations* tersebut dengan menetapkan komunikator, menetapkan jadwal/waktu pelaksanaan, memilih tempat pelaksanaan dan memilih cara bagaimana berkomunikasi dengan komunikan untuk mencapai tujuan atau hasil sebaik mungkin.

Hal tersebut dilakukan sesuai teori bahwa langkah ketiga adalah mengimplementasikan program aksi dan komunikasi yang didesain untuk mencapai tujuan spesifik untuk masing-masing publik dalam rangka mencapai tujuan program. Pertanyaan pada langkah ini adalah "Siapa yang harus melakukan dan menyampaikannya dan kapan, dimana, dan bagaimana caranya?" (Cutlip, Center, & Broom, 2011, hal. 320).

Siapa yang harus melakukan yaitu terkait dengan komunikator yang menyampaikan pesan kepada penerima atau publik sasaran. PKB/ PLKB adalah petugas lapangan yang berperan sebagai komunikator utama dalam pelaksanaan aktivitas *public relations* dalam mengkomunikasikan program pengendalian

penduduk dan keluarga berencana. Dalam menjalankan tugasnya sebagai komunikator, PKB/ PLKB melakukan koordinasi dengan perangkat desa, puskesmas, bidan desa dan kader. Di samping itu petugas lapangan ini harus mampu melakukan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) terkait program pengendalian penduduk dan keluarga berencana termasuk di dalamnya program GenRe (Generasi Berencana) kepada kelompok remaja.

Adapun menurut teori bahwa komunikator harus punya informasi yang memadai. Komunikator harus punya kredibilitas dimata penerima. Komunikator harus mampu menyampaikan informasi dengan cara yang dapat dipahami penerima. Komunikator harus menggunakan saluran yang akan menyampaikan pesan kepada penerima (Cutlip, Center, & Broom, 2011, hal. 407).

PKB dan PLKB adalah garda terdepan dalam penggerakkan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana di lini lapangan. Mereka adalah orang-orang pilihan yang telah diberikan berbagai pelatihan oleh BKKBN di awal karirnya. Para PKB/ PLKB PNS yang diterima di BKKBN tidak bisa langsung bekerja sebelum lulus dalam pelatihan dasar khusus. Disamping itu, pelatihan atau bimbingan teknis bagi PKB/ PLKB ini terus diadakan. Balai Diklat BKKBN terus mengagendakan pelatihan-pelatihan baik itu untuk meningkatkan pengetahuan secara substantif, atau pelatihan keterampilan berkomunikasi. Jadi, bila dilihat dari bekal ilmu yang memadai, idealnya para PKB/ PLKB ini adalah komunikator yang tepat untuk menjalankan aktivitas *public relations*. Sebagai komunikator para PKB. PLKB ini telah, sedang dan akan terus melaksanakan aktivitas *public relations* kepada masyarakat sesuai dengan target yang diberikan oleh dinas.

Berdasarkan pengamatan peneliti, komunikator dalam pelaksanaan aktivitas *public relations* dalam mengkomunikasikan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana itu benar dilakukan oleh PKB/ PLKB. Para PKB/PLKB itu sudah menjalankan aktivitas *public relations* kepada kelompok sasaran di masyarakat. Bentuk *public relations* yang dilakukan berupa komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat. Dalam konteks tindakan dan komunikasi, para PKB/ PLKB ini melakukan aktivitas *public relations* melalui berbagai kegiatan baik itu yang sifatnya rutin maupun penugasan khusus. Tujuan utama dari aktivitas *public relations* itu adalah menurunkan angka kelahiran. Ada istilah TFR (*Total Fertility Rate*) atau rata-rata angka kelahiran dengan target 2,1 yang memiliki makna bahwa seluruh keluarga di Indonesia itu memiliki anak maksimal 2. Cara atau upaya yang digunakan untuk mewujudkan TFR tersebut adalah dengan melakukan KIE kepada masyarakat supaya menjadi peserta KB aktif. Bagi perempuan, mereka menggunakan alat kontrasepsi seperti IUD (alat kontrasepsi dalam Rahim), implant (susuk KB), suntik, dll. Bagi laki-laki, ada metode kontrasepsi jangka panjang dengan vasektomi (penutupan saluran mani) melalui operasi kecil. Inilah aktivitas yang secara kasat mata bisa dilihat oleh masyarakat secara luas terkait buah dari aktivitas *public relations* dalam mengkomunikasikan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Tetapi, masih ada sasaran lainnya selain pasangan usia subur (PUS) untuk menjadi peserta KB aktif, yaitu KIE program GenRe kepada anak remaja termasuk di dalamnya pembentukan dan pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R). Berdasarkan informasi baik dari sekretaris dinas, PKB/PLKB dan kader/ akseptor dikatakan

bahwa remaja adalah sasaran dari program pengendalian penduduk dan keluarga berencana juga. Tetapi dalam hal ini adalah pemahaman program GenRe yang merupakan turunan dari program pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dalam praktik aktivitas *public relations* kepada remaja berupa KIE GenRe, sosialisasi atau pertemuan dengan remaja itu ada, substansi program generasi berencana (GenRe) itu sudah disampaikan tetapi intensitasnya masih kurang. Para petugas lapangan ini bergerak untuk melakukan KIE GenRe itu bila ada penugasan khusus dari dinas. Sehingga keberlanjutan pertemuan dengan anak remaja ini tidak pasti bahkan tidak ada. Ada juga aktivitas *public relations* para PKB/ PLKB ini yang bertujuan untuk membentuk PIK-R di tingkat RW misalnya, tetapi setelah terkumpulnya anak-anak remaja dan bersedia untuk menjadi anggota PIK-R, tidak ada pertemuan lanjutan untuk membekali pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan PIK-R, apa peran dari setiap pengurus dan anggota PIK-R tersebut. Sehingga tidak aneh bila PIK-R yang sudah terbentuk itu menjadi tidak aktif. Informasi mengenai jumlah PIK-R yang hanya ada 4 PIK-R di seluruh Karangpawitan ini memberikan gambaran bahwa konsentrasi *public relations* para PKB/ PLKB ini belum memprioritaskan remaja sebagai sasaran program pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Padahal sebagaimana keterangan dari sekretaris dinas, dijelaskan bahwa program GenRe itu adalah pintu gerbang para remaja mengenal program pengendalian penduduk dan keluarga berencana sejak dini.

Menurut narasumber utama yaitu Kepala Dinas PPKBPPPA Kabupaten Garut mengungkapkan bahwa hingga saat ini penggerakkan program pengendalian

penduduk dan keluarga berencana masih lebih berfokus pada pelayanan akseptor. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya produk hukum atau legislasi yang mengatur secara tegas untuk terbentuknya PIK-R. Jadi, para PKB/ PLKB ini memang ada kendala administratif. Apa yang disampaikan narasumber ini memberikan pencerahan tentang alasan yang mendasari rendahnya kuantitas dan kualitas PIK-R di Kabupaten Garut dan Kecamatan Karangpawitan khususnya.

Dalam mencapai tujuan dan efek yang di harapkan dari komunikasi, memilih cara mana yang diambil dalam berkomunikasi merupakan hal yang sangat penting. Komunikasi tatap muka (*face-to-face communication*) dipergunakan apabila kita mengharapkan efek perubahan tingkah laku dari komunikasi. Mengapa demikian, karena kita sewaktu berkomunikasi memerlukan umpan balik langsung (Effendy, 2004, hal. 31-32). Berdasarkan jumlah yang dihadapi komunikator, komunikasi tatap muka diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu pertama komunikasi antarpersona (*Interpesonal communication*) adalah komunikasi antara komunikator dengan seorang komunikan. Komunikasi jenis ini dianggap paling efektif dalam hal upaya mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang, karena sifatnya dialogis, berupa percakapan. Kedua komunikasi kelompok (*group communication*) adalah komunikasi dengan sejumlah komunikan (Effendy, 2004, hal. 8).

Pelaksanaan aktivitas *public relations* kepada masyarakat dilakukan dengan berbagai cara. KIE adalah istilah yang lebih akrab untuk *public relations*. Terdapat KIE individu, KIE kelompok, KIE massa dan konseling kepada akseptor. Dalam kesehariannya, para PKB/ PLKB ini memiliki agenda untuk melaksanakan KIE individu, KIE kelompok, KIE massa dan konseling. Ini merupakan bentuk

terjemahan dari rencana kerja sesuai dengan target makro dan mikro program pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang ditetapkan oleh dinas. Agenda rencana teknis ini kemudian diaplikasikan dalam praktik KIE kepada kelompok sasaran. Ada yang sasarannya individu, kelompok, dan massa atau kelompok besar. Pelaksanaan KIE ini melibatkan berbagai pihak, ada perangkat desa, bidan desa, puskesmas dan kader, bergantung pada topik KIE yang diberikan.

Inti dari setiap aktivitas penggerakkan program pengendalian penduduk dan KB ini adalah *public relations* karena sasaran program ini adalah masyarakat, termasuk remaja dan pemuda di dalamnya yang merupakan sasaran program GenRe dan PIK-R. Cara termudah untuk mengukur sejauhmana efektivitas *public relations* program pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah dengan melihat capaian kinerja dari target yang diberikan. Berikut adalah data pencapaian program pengendalian penduduk dan keluarga berencana tingkat Kecamatan Karangpawitan pada tahun 2020. Berdasarkan laporan umpan balik program pengendalian penduduk dan keluarga berencana sampai dengan bulan desember tahun 2020, terdapat sebanyak 17.304 peserta KB aktif dari target total yang diberikan dinas, yaitu 21.129 peserta KB aktif. Jumlah peserta aktif tersebut merupakan hasil yang didapatkan melalui aktivitas *public relations* para PKB/ PLKB yang terintegrasi dalam kegiatan inti atau penunjang program pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Namun, untuk penggerakkan aktivitas *public relations* kepada remaja, aktivitas *public relations* berupa KIE program Generasi Berencana (GenRe) baru menghasilkan 4 PIK-R.

#### **4.3.4 Melakukan Evaluasi**

Berdasarkan aktivitas *public relations* yang telah dilaksanakan, baik para PKB/ PLKB maupun Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA) Kabupaten Garut melakukan evaluasi sesuai dengan kapasitasnya. Evaluasi yang dilakukan terkait program pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan tata kelola pelaksanaan aktivitas *public relations*.

Hal tersebut sesuai dengan teori bahwa evaluasi dapat dilakukan dengan dua cara, yakni evaluasi program dan evaluasi manajemen. Evaluasi program biasa disebut evaluasi sumatif (*summative evaluation*). Evaluasi ini memiliki fokus untuk melihat sejauhmana tujuan akhir yang ingin dicapai (*goal*) dari suatu kegiatan, apakah terpenuhi atau tidak (Cangara, 2014, hal. 174).

Adapun tujuan akhir yang ingin dicapai dari aktivitas *public relations* untuk mengkomunikasikan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana ini adalah terwujudnya penduduk tumbuh seimbang dengan indikator utama TFR 2,1. TFR (*Total Fertility Rate*) adalah rata-rata perempuan melahirkan, dengan adanya target TFR 2,1 berarti rata-rata kelahiran di setiap keluarga itu adalah 2 atau 1 orang saja. Cara yang digunakan supaya TFR ini tercapai adalah dengan penggerakan program KB di masyarakat. Inilah salah satu aktivitas *public relations* dari para PKB/ PLKB yang sudah tidak asing lagi. Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi program KB, melakukan pertemuan kader, memfasilitasi pelayanan bagi akseptor, memberikan penyuluhan dan konseling adalah beberapa tugas yang menjadi keseharian mereka. Dari perspektif tugas-tugas tersebut kinerja para PKB/ PLKB ini bisa dikatakan berhasil dan keberhasilan itu menandakan bahwa aktivitas

*public relations* mereka berjalan efektif. Namun, ada salah satu turunan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yaitu program GenRe (Generasi Berencana) yang belum berjalan maksimal. Sebagaimana data dan informasi dari PKB/ PLKB di Kecamatan Karangpawitan, kecamatan ini baru memiliki 4 PIK-R padahal Kecamatan Karangpawitan memiliki wilayah yang luas dan terbagi menjadi 20 desa/ kelurahan.

Jadi, apabila ditarik kesimpulan, aktivitas *public relations* program pengendalian penduduk dan keluarga berencana khususnya di Kecamatan Karangpawitan berjalan dengan baik apabila dilihat dari capaian indikator tingkat kepesertaan ber-KB masyarakat, ada yang memakai alat kontrasepsi pil, suntik, IUD, Implant dll. Namun, aktivitas *public relations* ini belum berjalan dengan maksimal ketika dihadapkan kepada kalangan remaja, yaitu program GenRe (Generasi Berencana) dengan indikator keberhasilannya yaitu dapat membentuk dan mengelola Pusat Informasi dan Konseling Remaja.

Berdasarkan pernyataan dari PKB/ PLKB dan pihak dinas berikut observasi yang dilakukan peneliti, aktivitas *public relations* mereka itu selalu dipantau. Adanya laporan bulanan terkait capaian program dan rapat pengendalian program yang berlangsung secara kontinyu, memberikan sinyal bahwa sistem evaluasi yang bertujuan mengukur kinerja para PKB/ PLKB ini ada. Dinas PPKBPPPA memiliki peran sentral untuk mengadakan evaluasi capaian program setiap bulannya. Disamping evaluasi yang dilakukan oleh dinas, para PKB/ PLKB ini mengadakan evaluasi yang lebih teknis di lini lapangan, evaluasi ini dipimpin oleh koordinator PKB/ PLKB atau kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) KB.

Adapun evaluasi manajemen memiliki fokus terhadap pencapaian operasional kegiatan: Apakah hal-hal yang dilakukan masih dalam tataran rencana yang telah ditetapkan semula, apakah usaha yang dilakukan itu mengalami kemajuan atau tidak, apakah ada hambatan atau kemacetan yang ditemui dalam operasional atau tidak dan bagaimana cara mengatasinya (Cangara, 2014, hal. 174-175). Evaluasi capaian program pengendalian penduduk dan keluarga berencana ini bersifat komprehensif. Evaluasi ini tidak hanya melihat dari capaian angka tetapi melihat hal-hal lain yang menjadi pendukung atau penghambat aktivitas *public relations* program pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Jumlah personel, kualitas sumber daya, cakupan wilayah, koordinasi dengan mitra kerja, hubungan dengan tokoh masyarakat dan agama, dsb merupakan beberapa hal yang menjadi objek pembahasan pada saat evaluasi.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan aktivitas *public relations* untuk mengkomunikasikan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah (1) dari sisi sumber daya manusia, PKB/ PLKB ini tidak memiliki banyak waktu untuk memberikan monitoring, mentoring atau pendampingan khusus kepada para remaja yang sudah diberikan sosialisasi program Generasi Berencana karena PKB/ PLKB juga memiliki tugas lain, yaitu melayani PUS untuk ber-KB, (2) dari sisi regulasi, sampai tahun 2020 belum adanya regulasi yang tegas mengatur kewajiban terbentuknya Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) baik di lingkungan pendidikan atau masyarakat. Dengan adanya hasil tersebut, para PKB/ PLKB harus terus meningkatkan kinerjanya terutama dalam melakukan aktivitas *public relations*

kepada remaja. Diharapkan ada pendekatan-pendekatan *public relations* yang ramah remaja supaya baik program GenRe maupun eksistensi Pusat Informasi dan Konseling Remaja bisa diakui dan memasyarakat. Berdasarkan pengamatan peneliti, pada setiap rapat atau pertemuan dengan kader, topik pembicaraan itu lebih berfokus pada cara bagaimana meningkatkan partisipasi akseptor KB, khususnya bagi yang belum menjadi akseptor. Di samping itu, pembicaraan pertemuan juga lebih ke teknis pengelolaan data yang lebih tertib dan rapi. Ada pun pembicaraan mengenai program GenRe dan PIK-R itu terlihat hanya sepintas, jarang terjadi pembicaraan yang alot, tentunya kenyataan ini perlu disikapi dengan manajemen kepegawaian yang efektif.

Pemaparan di atas sesuai dengan yang disampaikan oleh narasumber yaitu Yayan Waryana yang menyatakan bahwa evaluasi manajemen terkait personil adalah sebuah kewajiban pimpinan. Dalam hal ini, secara berjenjang dinas sudah melakukan evaluasi. Selain itu beliau memaparkan bahwa PKB/ PLKB sebagai *public relations* atau komunikator utama program harus benar-benar kompeten baik dari sisi pengetahuan program maupun keterampilan berkomunikasi. Untuk meningkatkan peran serta petugas lapangan KB ini, sebetulnya dinas sudah sering melaksanakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan sisi pengetahuan program. Namun, dengan adanya hasil seperti ini, dinas dan para PKB/ PLKB tidak pasrah begitu saja dengan melihat adanya unsur program lain, yaitu program GenRe dan wadah kelompoknya, yaitu Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang belum mendapatkan hasil memuaskan.